

## **EVALUASI KEBIJAKAN *FULL DAY SCHOOL* TERHADAP EKSISTENSI MADRASAH DINIYAH**

**Rois Luthfi (19204010009)**

**UIN Sunan Kalijaga**

**19204010009@student.uin-suka.ac.id**

### **Abstrak**

*Full Day School* merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mendikbud Muhadjir Efendy dengan adanya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Dengan keluarnya permendikbud ini maka sekolah yang asalnya enam hari menjadi lima hari dengan ketentuan delapan jam pelajaran setiap harinya. Yang asalnya kegiatan belajar mengajar dari pagi sampai siang, maka dengan adanya kebijakan ini kegiatan belajar mengajar menjadi pagi sampai sore hari.

Tidak sedikit masyarakat yang menanggapi negatif dari kebijakan *full day school* ini. Mereka menganggap bahwa *full day school* dapat mematikan kegiatan sekolah sore / sekolah keagamaan / madrasah diniyah. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa kebijakan ini akan membuat para siswa kurang bersosial dengan masyarakat. Dan masih banyak permasalahan lainnya.

Dengan adanya tanggapan negatif masyarakat tersebut, maka kebijakan ini perlu adanya evaluasi. Yaitu dengan mempertanyakan kembali bagaimana sebenarnya proses pelaksanaan *full day school* ini?, apakah semua sarana-prasarana di sekolah-sekolah sudah memadai?, bagaimana dengan para siswa yang rumahnya jauh dari sekolah? Bagaimana dengan para siswa yang sore harinya harus mengaji di pondok pesantren atau madrasah diniyah?, dan lain-lain. Hasil akhir dari evaluasi ini adalah revisi kebijakan atau bahkan penghapusan kebijakan.

**Kata Kunci :** *full day school, pro dan kontra, madrasah diniyah, evaluasi*

## PENDAHULUAN

Pemerintah melakukan berbagai strategi dalam upaya untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah adalah menetapkan kebijakan sekolah lima hari. Dimana sekolah yang asalnya enam hari dengan kegiatan pembelajaran sampai siang, diganti dengan lima hari dengan kegiatan pembelajaran sampai sore hari. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini berharap agar para siswa dapat memiliki karakter yang baik, tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas, dekat dengan keluarga, dan dapat memaksimalkan waktunya dengan baik.

Senada dengan i'tikad baik pemerintah terkadang tidak sepenuhnya berjalan mulus karena yang namanya kebijakan pasti akan menimbulkan *pro* dan *kontra* yaitu munculnya polemik di tengah masyarakat, munculnya kebijakan *full day school* dinilai dapat mematikan madrasah-madrasah diniyah yang sudah berjalan di Indonesia, khususnya di desa-desa. Pada kenyataannya dampak dari kebijakan *full day school* ini adalah menurunnya eksistensi kegiatan belajar mengajar yang terdapat di madrasah diniyah atau pondok pesantren.<sup>185</sup>

Terjadinya *pro* dan *kontra* ini mengharuskan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan *full day school*. Apakah kebijakan *full day school* sudah tepat diterapkan di Indonesia?, Apakah benar dengan adanya *full day school* dapat membentuk karakter yang baik bagi para siswa?, Apakah dengan adanya *full day school* menjamin para siswa untuk tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas?. Setidaknya dari permasalahan inilah penulisan makalah ini dilakukan.

## PEMBAHASAN

### Evaluasi Kebijakan

Evaluasi dalam sebuah kebijakan perlu untuk dilakukan, karena dengan evaluasi, suatu kebijakan akan dapat terkontrol dengan baik. Dalam memahami evaluasi

---

<sup>185</sup> Estu Suryowati. "Muhaimin Menilai: Full Day School Ganggu Tradisi Pendidikan Nahdliyin", diunggah pada tanggal 7 Agustus 2017. Diunduh dari: [https://nasional.kompas.com/read/2017/08/07/12545881/muhaimin-menilai-full-day\\_school-ganggu-tradisi-pendidikan-nahdliyin](https://nasional.kompas.com/read/2017/08/07/12545881/muhaimin-menilai-full-day_school-ganggu-tradisi-pendidikan-nahdliyin) tanggal 25 Oktober 2019.

kebijakan maka perlu adanya pembahasan mengenai alasan, tujuan, tipe-tipe, langkah-langkah, dan kriteria dalam evaluasi kebijakan.

### **1. Alasan Pentingnya Evaluasi Kebijakan**

Beberapa alasan mengapa perlu adanya evaluasi, di antaranya adalah untuk mengetahui seberapa jauh sebuah kebijakan mencapai tujuannya, mengetahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, dan sebagai bahan koreksi agar masalah yang terjadi dalam sebuah kebijakan tidak akan terulang lagi (sebagai perbaikan).<sup>186</sup>

### **2. Tujuan Evaluasi Kebijakan**

Dilakukannya sebuah evaluasi kebijakan tentunya mempunyai beberapa tujuan, di antaranya yaitu untuk mengukur tingkat keefisienan suatu kebijakan, menentukan tingkat pencapaian sebuah kebijakan, mengetahui seberapa besar dampak suatu kebijakan, mengetahui segala penyimpangan yang terjadi dalam suatu kebijakan, dan sebagai bahan untuk perbaikan untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya.<sup>187</sup>

### **3. Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan**

Tipe-tipe evaluasi kebijakan secara teori dalam jurnal publik dibagi menjadi tiga, yaitu evaluasi *ex-ante*, evaluasi *on-going*, dan evaluasi *ex-post*.

- a. Evaluasi *ex-ante*, yaitu evaluasi kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Maksud dari evaluasi ini adalah untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi jenis ini digunakan untuk mengantisipasi dan memberikan penilaian awal atas pengaruh, perkiraan, dan konsekuensi dari kebijakan yang telah direncanakan atau ditetapkan. Dengan evaluasi ini, maka akan memberikan sebuah informasi yang relevan dengan kebijakan atau dengan proses pembuatan kebijakan yang sedang berjalan. Evaluasi ini juga memberikan analisa dampak terhadap lingkungan kebijakan.
- b. Evaluasi *on-going*, yaitu evaluasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan kebijakan dengan maksud untuk menentukan seberapa besar kemajuan dalam pelaksanaan kebijakan yang sudah berjalan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Evaluasi jenis ini dapat menjamin agar tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Perlu diingat, bahwa evaluasi ini tidak untuk mengevaluasi penilaian akhir capaian kinerja pelaksanaan

---

<sup>186</sup> Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 123-124.

<sup>187</sup> Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi...*, hlm. 120-121.

kebijakan. Selanjutnya, dengan adanya evaluasi ini, maka jika terjadi ketidakberesan atau penyimpangan, harapannya dapat diperbaiki sedini mungkin dengan melalui sejumlah rancangan/ rekomendasi, sehingga hasil akhir pelaksanaan kebijakan akan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan adanya evaluasi *on-going* adalah maka peng-evaluasi kebijakan akan mendapatkan informasi yang relevan yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses pelaksanaan kebijakan ke arah yang ingin dicapai.

- c. Evaluasi *ex-post*, yaitu evaluasi setelah pelaksanaan kebijakan sudah selesai. Tujuan dari evaluasi ini untuk mendapatkan sebuah gambaran mengenai tingkat pencapaian dalam sebuah kebijakan. Evaluasi ini berguna untuk menilai seberapa keefektifan, seberapa keefisienan, dan seberapa kebermanfaatannya sebuah kebijakan.<sup>188</sup>

#### **4. Langkah-langkah Evaluasi Kebijakan Publik**

Terdapat enam langkah dalam melakukan evaluasi kebijakan menurut Suchman, sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno. Enam langkah tersebut adalah menganalisis sebuah masalah, mengidentifikasi tujuan program, menganalisis terhadap masalah, mendeskripsikan dan membuat sebuah standar yang akan dilakukan, melakukan pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi, menganalisis hakikat penyebab dari perubahan, dan membuat beberapa indikator sebagai bahan untuk mengetahui beberapa dampak dari suatu kebijakan yang akan diterbitkan.

Dari beberapa langkah di atas, poin penting dalam melakukan evaluasi kebijakan adalah mendefinisikan sebuah masalah, karena dengan melakukan itu tujuan-tujuan dari kebijakan akan dapat disusun dengan jelas pula. Ketidakmampuan dalam mendefinisikan masalah akibatnya adalah tidak sanggupnya membuat tujuan-tujuan kebijakan yang baik.<sup>189</sup>

#### **5. Kriteria-kriteria Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi kebijakan mempunyai kriteria-kriteria, tipe-tipe, atau karakteristik.

Maksudnya adalah evaluasi dalam sebuah kebijakan dapat dilaksanakan pada bagian-bagian tertentu. Menurut Dunn bagian ini terbagi menjadi enam, yaitu

---

<sup>188</sup> Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik", *Jurnal Publik*, Vol. 11, No. 01, (2017), hlm, 8.

<sup>189</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori & Proses*, (Yogyakarta: MedPress, 2008), hlm. 230-231.

efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Maka di dalam meng evaluasi sebuah kebijakan perlu dipertanyakan, apakah sebuah kebijakan tersebut sudah efektif?, sudah efisien?, sudah menjadi solusi-solusi dari masalah-masalah yang ada?, apakah kebijakan tersebut sudah merata untuk semua kalangan yang dituju?, apakah kebijakan tersebut sudah dapat memuaskan kebutuhan masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu sebagai objek kebijakan apa belum?, apakah kebijakan yang dikeluarkan sudah tepat untuk menjawab masalah-masalah yang ada apa belum, dan lain-lain.<sup>190</sup>

### **Full Day School**

*Full day school* merupakan kebijakan sekolah yang mengharuskan siswa masuk pagi dan pulang sore. Akan tetapi tidak full satu minggu, yaitu hari senin sampai jum'at saja (lima hari sekolah). Kebijakan ini tertuang dalam permendikbud nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah yang dikeluarkan pada tanggal 9 juni 2017.

Kebijakan ini diharapkan agar pendidikan tidak hanya terpaku pada buku teks tetapi juga pendidikan diharapkan juga sebagai penanaman karakter-karakter mulia. Yang mana penanaman karakter tersebut lebih dikenal dengan istilah PPK (Penguatan Pendidikan Karakter). *Full Day School* merupakan kebijakan yang awalnya diharapkan menjadi perwujudan gagasan menyinergikan seluruh unsur praktik pendidikan yang memungkinkan karakter siswa dididik dalam kerangka besar pendidikan formal.

Adapun dasar dimunculkannya kebijakan ini adalah karena menurut kemendikbud sesuai dengan program nawacita presiden Republik Indonesia. Yang mana dalam nawacita tersebut agenda salah satunya adalah mengkonsep kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan pendidikan karakter. Hal inilah yang yang dijadikan dasar kemendikbud dalam menetapkan kebijakan *full day school*. Selain ini dasar dimunculkannya kebijakan ini adalah adanya tuntutan global dalam dunia pendidikan. Yaitu menumbuhkan karakter pada siswa agar mereka dapat berfikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi, dan mampu untuk berkolaborasi tujuannya adalah agar para siswa dapat bersaing di abad ke 21 ini. Dan semuanya itu sudah sejalar dengan empat kompetensi yang harus dimiliki oleh para siswa yaitu berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, kreatif, mampu berkomunikasi dengan baik, dan mampu untuk bekerja sama.

Hari sekolah yang diatur dalam Permendikbud bertujuan untuk memperkuat pendidikan karakter siswa melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ada banyak aktivitas belajar yang dilakukan dengan bimbingan dan pembinaan guru. Aktivitas tersebut dilakukan dengan tetap mengacu pada lima nilai prioritas pendidikan karakter, yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas.

---

<sup>190</sup> Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 537.

Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum, yaitu belajar sesuai mata pelajaran yang tercantum dalam kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan atau pendalaman kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran/bidang sesuai dengan kurikulum. Contoh kegiatan kokurikuler adalah kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian siswa secara optimal. Beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang biasanya terdapat di sekolah antara lain Paskibra, kelompok ilmiah remaja, klub basket, dan kegiatan keagamaan. Contoh kegiatan keagamaan adalah aktivitas di madrasah diniyah, pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi (pemberian pelajaran dalam ilmu agama Kristen), *retreat*, baca tulis Al Quran, dan kitab suci lainnya.

Alokasi 70 persen untuk pendidikan karakter dalam pelaksanaan *full day school* diharapkan juga melibatkan keluarga, terutama orang tua. Waktu berkualitas pada akhir pekan dapat digunakan untuk rekreasi dan membangun kedekatan antara anak dan orang tua. Dalam hal ini diperlukan literasi keluarga, karena keluarga merupakan agen pertama dan utama dalam mengembangkan jati diri dan identitas anak sebagai warga masyarakat dan warga negara. Keteladanan orang tua merupakan kunci keberhasilan pendidikan karakter anak.<sup>191</sup>

### **Permasalahan Full Day School terhadap Eksistensi Madrasah Diniyah**

Permasalahan kebijakan *full day school* terhadap eksistensi Madrasah Diniyah dapat dilihat dari beberapa berita online, di antaranya:

#### **a. Kumparan**

Berita online kumparan memberitakan bahwa kebijakan *full day school* jika dilihat sepintas memang kelihatan bagus, akan tetapi pada realitasnya kebijakan ini tidaklah demikian. Alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan ini salah satunya adalah untuk menghindarkan anak dari pergaulan bebas, dikarenakan anak pulang pada siang hari dan waktu bagi anak untuk pergi bermain tanpa pengawasan kedua orangtua. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan pemerintah tidaklah semua pendapat tersebut benar, karena pemerintah tidak melihat secara menyeluruh masyarakat Indonesia secara luas akan tetapi pemerintah lebih cenderung untuk melihat pada lingkup kecil saja yaitu kalangan elit yang berada diperkotaan, yang mana para kedua orangtua diperkotaan kebanyakan adalah seorang pekerja. Baik seorang ibu maupun bapak.

Dalam mengeluarkan kebijakan ini pemerintah kurang memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia secara menyeluruh, diantaranya yaitu masyarakat pedesaan, atau kampung-kampung, yang mana di masyarakat pedesaan walaupun anak-anak pulang siang hari tidak semua dari mereka akan terjerumus kedalam pergaulan bebas karena keadaan sosial di pedesaan tentunya berbeda dengan keadaan social

---

<sup>191</sup> Yulia Indahri, Peneliti Madya Pengembangan Budaya Desa-Kota pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, "Kebijakan Lima Hari Sekolah", *Majalah Info Singkat*, Vol. IX, No. 13/I/Puslit/Juli/2017, hlm. 10.

di perkotaan. Di pedesaan, sifat kepedulian masih banyak terlihat. Jika didapati seorang anak yang nakal atau melenceng dari tata moral maka di masyarakat di pedesaan lebih cenderung akan mengingatkan, berbeda dengan diperkotaan, yang cenderung cuek.

Selain itu, anak-anak yang berada di pedesaan atau di Indonesia tidak semuanya *nganggur* pada sore harinya. Mereka terkadang ada yang membantu orangtuanya untuk bekerja, ada yang mempunyai kegiatan di pesantren (jika seorang anak tersebut tinggal di lingkungan pesantren), ada yang masuk Madrasah Diniyah atau sekolah sore.

Selain itu alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan ini adalah untuk membentuk karakter anak agar menjadi anak yang mempunyai karakter mulia. Dari alasan tersebut, ada beberapa masyarakat yang menolak adanya kebijakan ini dikarenakan, kebijakan ini bukanlah satu-satunya jalan untuk membentuk karakter seorang anak menjadi mulia. Justru Madrasah Diniyah-lah yang selama ini sudah teruji kebenarannya dalam membentuk karakter mulia seorang anak. Di Madrasah Diniyah anak akan diajari membaca al-Qur'an, menghafal surat-surat pendek, mempelajari nilai-nilai agama dengan baik, belajar bagaimana akhlak yang baik, dan lain-lain yang semuanya justru sudah teruji akan manfaatnya. Yaitu dapat membentuk karakter mulia anak.<sup>192</sup>

#### b. Serambimata

Dampak kebijakan lima hari di sekolah mulai pagi hingga sore hari yang kemudian populer dengan *FDS (Full Day School atau Five Days School)* benar-banar terbukti. Di sejumlah daerah, banyak madrasah diniyah (madin) kehilangan siswa. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk segera mencari solusi.

Pengelola Ponpes Al-Hikmah, Lampung, Muallimin yang juga menyelenggarakan TPA mengatakan selama ini siswanya ada 20 orang, "Sepekan ini tidak ada satupun yang datang ke mushala,". Ternyata setelah ditelusuri, SDN tempat anak itu sekolah, menerapkan sekolah lima hari. Menurut dia anak-anak pulang jam 15.00 dan tidak memungkinkan untuk bisa ikut TPA lagi. Padahal pendidikan TPA di tempatnya tidak hanya baca Alquran saja. Tetapi juga ada materi tajwid dan fiqih. Dia berharap TPA yang sudah jalan selama tiga tahun itu bisa aktif kembali melayani masyarakat.

Kondisi serupa juga terjadi di Indramayu. Pengurus Yayasan Assafi'iyah, Patrol, Indramayu Muhammad Hafifi mengatakan sebagian SDN di daerahnya sudah menerapkan sekolah lima hari. Akibatnya banyak Madin yang kehilangan siswa. "Kami sampai buka posko pengaduan FDS" jelasnya. Posko itu diharapkan bisa menampung keluhan pengelola Madin.

Hafifi sendiri mengelola Madin Takmiliah Ma'arif dengan jumlah siswa 250-an anak. Untung di kecamatannya seluruh SDN masih memakai enam hari sekolah. Jadi seluruh siswa madin di tempatnya masih utuh. "Tetapi di kecamatan tetangga seperti Loh Sarang dan Anjatan sudah lima hari sekolah," jelasnya.

Ketua Rabhithah Ma'ahid Islamiyah (RMI), Abdul Ghofar Rozin menyebut laporan dan keluhan kesah pengelola madrasah diniyah (madin) dan pondok pesantren masuk masuk ke meja RMI semenjak Permendikbud itu diberlakukan pada Juni lalu.

Rozin, sapaan akrabnya, menyebut beberapa contoh. Di Madin Nurul Huda, Soka, Poncowarno, Kebumen Jateng. Sejak kebijakan sekolah 5 hari dikeluarkan, para siswanya sudah tidak pernah terlihat di madin lagi. Dari laporan didapati bahwa para santrinya terlalu lelah karena pulang dari sekolah jam 17.00.

Di Madin Miftahul Ulum, desa Kedungjati, Kecamatan Sempor, masih di Kebumen, para santri yang berstatus siswa SLTA tidak bisa lagi hadir karena pulang ke rumah pukul 16.30. "Pengajiannya dimulai pukul 16.00, mereka sudah lelah," katanya.

Di Pondok Pesantren Darussalam Bandar Jaya Lampung, jumlah siswa menurun drastis sejak Juni. "Satu kelas habis tinggal 2 orang," katanya. Selain itu masih ada beberapa laporan dari Semarang dan Banyumas.

---

<sup>192</sup> Khozanah Hidayati, "Full Day School akan Bubarkan Madrasah Diniyah", diunggah pada 15 Juni 2017, diunduh dari: <https://kumparan.com/blokbojonegoro/full-day-school-akan-bubarkan-madrasah-diniyah-1497597573854> pada Tanggal 25 Oktober 2019.

Rozin menjelaskan bahwa para santri yang mundur rata-rata adalah mereka yang menempuh pendidikan formal sembari menempuh pendidikan di pesantren. Karena ada beban tambahan di sekolah, mereka memilih meninggalkan pesantren. "Ada yang pamit sendiri, ada yang dipamitkan oleh orang tuanya," katanya.

Menurut Rozin, meskipun pemerintah menetapkan bahwa permendikbud hanya akan berlaku sebagian, tapi kenyataannya, di daerah-daerah, para kepala Dinas Pendidikan maupun Kepala-Kepala sekolah sangat bersemangat untuk mewujudkannya tanpa memikirkan dampak terhadap madrasah diniyah.<sup>193</sup>

c. Merdeka

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud khawatir Madrasah Diniyah akan mati seiring dengan penerapan sistem pendidikan *full day school*. Padahal, peran Madrasah Diniyah cukup penting. "Sekolah Diniyah itu yang mengajarkan karakter di Indonesia," jelas Marsudi.

Madrasah Diniyah berbeda dengan pesantren yang belajar agama 24 jam. Madrasah Diniyah hanya ada sore hari. Dengan penerapan *full day school*, dikhawatirkan anak-anak tidak memiliki waktu lagi untuk belajar agama.<sup>194</sup>

### **Evaluasi Kebijakan Full Day School**

*Terjadinya permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai kebijakan full day school mengharuskan Kemendikbud untuk mengevaluasi kebijakannya. Jika mengacu pada kriteria evaluasi kebijakan Dunn, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan, maka di dalam proses evaluasi terhadap kebijakan full day school ini perlu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:*

- a. Apakah dengan adanya *full day school*, menjadikan para siswa berkarakter mulia? Terhindar dari pergaulan bebas? Menjalin hubungan yang harmonis dengan keluarga?
- b. Apakah jalan satu-satunya untuk menjadikan para siswa berkarakter mulia dengan *full day school*?
- c. Apakah sosialisasi mengenai kebijakan *full day school* sudah dilaksanakan dengan benar? Apakah tata cara pelaksanaan *full day school* sudah disampaikan kepada semua sekolah?
- d. Apakah kebijakan *full day school* wajib dilaksanakan di semua sekolah di Indonesia?
- e. Apakah semua sekolah sudah memenuhi standar operasional untuk melaksanakan *full day school*?
- f. Apa hasil nyata dari kebijakan *full day school* ini? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan?

Semua pertanyaan-pertanyaan ini juga muncul atas realitas yang terjadi, di antaranya:

- a. Kebijakan *full day school* ini muncul tanpa didahului sosialisasi yang memadai kepada masyarakat.
- b. Kebijakan *full day school* ini kurang mempertimbangkan sarana dan prasarana. Seperti misalnya kurangnya kesiapan sarana dan prasarana bermain, beribadah, beristirahat, kantin, dan ketersediaan transportasi.
- c. Kebijakan *full day school* ini kurang mempertimbangkan konsekuensi terhadap para guru. dengan adanya kebijakan ini para guru secara otomatis akan pulang

---

<sup>193</sup> Tim Redaksi Serambimata, "Dampak FDS Mulai Terasa! Siswa Madin dan Pesantren Mulai Berkurang", diunggah pada 13 Agustus 2019, diunduh dari: <https://serambimata.com/2017/08/13/dampak-fds-mulai-terasa-siswa-madin-dan-pesantren-berkurang/>, pada Tanggal 26 Oktober 2019.

<sup>194</sup> Syifa Hanifah, "Full Day School Dikhawatirkan 'matikan' Madrasah Diniyah", diunggah pada 15 Agustus 2017, diunduh dari: <https://www.merdeka.com/peristiwa/full-day-school-dikhawatirkan-matikan-madrasah-diniyah.html>, pada Tanggal 25 Oktober 2019.



sore hari, padahal aktifitas para guru tidak hanya sebagai pendidik. Mereka juga mempunyai tanggungjawab-tanggungjawab lain di rumah.

Dengan adanya proses evaluasi ini maka hasil akhirnya adalah terjadinya **revisi kebijakan** atau **penghapusan kebijakan**.

### **KESIMPULAN**

Kebijakan *full day school* perlu adanya evaluasi karena pada praktiknya di lapangan terjadi beberapa permasalahan. Di antaranya, kurangnya sosialisasi, tidak adanya juknis, kurang mempertimbangkan sarana-prasarana di sekolah, sekolah, kurang memperhatikan transportasi bagi siswa yang jaraknya jauh dari tempat sekolah.

Dengan demikian, para evaluator perlu menanggapi dan menjawab respon dari publik. Sehingga hasilnya adalah adanya revisi kebijakan yang dapat meminimalisir masalah-masalah yang terjadi dalam *full day school* atau bahkan penghapusan kebijakan *full day school*.

Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik", *Jurnal Publik*, Vol. 11, No. 01, 2017.

Hanifah, Syifa. "Full Day School Dikhawatirkan 'matikan' Madrasah Diniyah", diunggah pada 15 Agustus 2017, diunduh dari: <https://www.merdeka.com/peristiwa/full-day-school-dikhawatirkan-matikan-madrasah-diniyah.html>, pada Tanggal 25 Oktober 2019.

Hidayati, Khozanah. "Full Day School akan Bubarkan Madrasah Diniyah", diunggah pada 15 Juni 2017, diunduh dari: <https://kumparan.com/blokbojonegoro/full-day-school-akan-bubarkan-madrasah-diniyah-1497597573854> pada Tanggal 25 Oktober 2019.

Indahri, Yulia. Peneliti Madya Pengembangan Budaya Desa-Kota pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, "Kebijakan Lima Hari Sekolah", *Majalah Info Singkat*, Vol. IX, No. 13/I/Puslit/Juli/2017.

Nugroho, Riant. *Public Policy*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.

Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Suryowati, Estu. "Muhaimin Menilai: Full Day School Ganggu Tradisi Pendidikan Nahdliyin", diunggah pada tanggal 7 Agustus 2017. Diunduh dari: <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/07/12545881/muhaimin-menilai-full-day-school-ganggu-tradisi-pendidikan-nahdliyin> tanggal 25 Oktober 2019.

Tim Redaksi Serambimata, "Dampak FDS Mulai Terasa! Siswa Madin dan Pesantren Mulai Berkurang", diunggah pada 13 Agustus 2019, diunduh dari: <https://serambimata.com/2017/08/13/dampak-fds-mulai-terasa-siswa-madin-dan-pesantren-berkurang/>, pada Tanggal 26 Oktober 2019.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori & Proses*, Yogyakarta: MedPress, 2008.